

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP KONTEKS ETIKA POLITIK ISLAM KONTEMPORER

Osin¹, Wahyu², Kurniati³, Sofyan⁴

10200122024@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122034@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³, sofyansulnur17@gmail.com⁴

Uin Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tokoh pemikir dalam Islam yaitu Ibn Khaldun, tepatnya pada ranah konteks etika politik Islam kontemporer. Beliau terkenal dengan kecerdasannya sehingga beliau dijuluki sebagai bapak sosiologis politik dan sejarah, serta merupakan seorang ilmuwan terkenal di dunia barat maupun timur. Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi kontribusi akademis bagaimana konsep etika politik Islam menurut Ibn Khaldun. Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana etika politik suatu negara menurut Ibnu Khaldun serta kontribusinya terhadap perkembangan politik Islam kontemporer. Sebenarnya Ibnu Khaldun tidak menekankan satu bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya berpusat pada Ashabiyyah. Menurut peneliti, konsep Ashabiyyah tersebut sesuai untuk menanggapi realitas sosial politik kontemporer. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan membahas permasalahan tentang bagaimana etika politik Islam menurut Ibn Khaldun dan kenapa etika politik sangat penting untuk direalisasikan dalam realitas sosial politik kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-interpretatif dengan melakukan studi literatur dari beberapa sumber primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dipelajari, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kata kunci: Etika politik, Ibn Khaldun, Islam.

ABSTRACT

This research discusses the thinker figure in Islam, namely Ibn Khaldun, especially in the Middle Ages, who discusses political concepts, especially Islamic political ethics. His ability and intelligence in explaining concepts, systems and political history of his time remains a reference for politicians involved in politics by paying attention to political ethics based on a strong theological foundation. His intelligence is also called the father of political sociology and history, and is a famous scientist in the western and eastern worlds. In fact, Ibn Khaldun did not emphasize one form of political system in government, but his political concept was centered on Ashabiyyah. According to the author, the Ashabiyyah concept is suitable for addressing current socio-political realities. So the author is interested in studying it by discussing the issue of Islamic political ethics according to Ibnu Khaldun and why political ethics is very important to be realized in today's social and political realities. The research method used is a qualitative-interpretive method by conducting literature studies from several primary and secondary sources. The data obtained will be collected, studied and synthesized and then analyzed carefully to get answers to the problems posed.

Keywords: political ethics, Ibn Khaldun, Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti etika dibedakan menjadi tiga. Pertama, ilmu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, gabungan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.

Kebebasan merupakan hak yang imanen dengan keberadaan setiap individu sebagai seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia, harus memiliki perilaku/tindakan yang baik. Hal demikian menjadi keniscayaan agar kehidupan manusia di tengah manusia lainnya dapat berjalan dengan baik, aman, serta nyaman, dimana tiap manusia akan tertanan sikap untuk saling membantu dan menghargai satu dengan lainnya. Dalam konteks inilah kemudian manusia menjadi makhluk beretika. Manusia adalah makhluk *ethos and mores*, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemakhlukannya sebagai insan yang beretika dan bermoral.

Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi kontribusi akademis bagaimana konsep etika politik Islam menurut Ibn Khaldun. Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana karena beberapa alasan utama. Pertama, Ibn Khaldun adalah salah satu pemikir Islam terbesar dalam sejarah, yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang politik dalam tradisi Islam. Karya-karyanya tidak hanya mencakup analisis mendalam tentang dinamika sosial dan politik, tetapi juga menyajikan nilai-nilai etis yang menjadi dasar bagi tata kelola politik yang adil dan berkeadilan. Kedua, pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi yang kuat dalam konteks modern, di mana pemikiran politik yang berakar dalam nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk menanggapi tantangan kompleks dalam tata kelola politik dan pembangunan masyarakat. Ketiga, studi tentang etika politik Islam menurut Ibn Khaldun dapat membantu menggali potensi nilai-nilai Islam dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkeadilan.

Dengan memahami landasan etis yang kuat dalam politik Islam, kita dapat membimbing kebijakan dan praktik politik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian jurnal ini tidak hanya memberikan wawasan intelektual yang mendalam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun etika politik suatu negara menurut Ibnu Khaldun serta kontribusinya terhadap perkembangan politik Islam kontemporer. Sebagian besar peneliti hanya memaparkan konsep pemerintahan Ibn Khaldun tanpa menjelaskan mekanisme seperti apa yang Ibn Khaldun terapkan dalam memberikan sumbangsih pemikirannya dalam berjalannya sistem pemerintahan yang ideal.

Menurut pemikiran Ibn Khaldun memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks memahami dinamika politik dalam kerangka nilai-nilai Islam. Pemikiran Ibn Khaldun memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang prinsip-prinsip moral dan etika politik dalam Islam. Dengan meneliti jurnal ini, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang bagaimana keadilan, keberanian, integritas, dan kebijaksanaan menjadi landasan penting dalam tata kelola politik dalam tradisi Islam. Selain itu, pemikiran Ibn Khaldun tentang konsep-konsep seperti '*asabiyyah*' (solidaritas sosial) dan '*adl*' (keadilan) dapat memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana masyarakat dapat menciptakan struktur politik yang adil dan berkeadilan. Studi ini juga dapat membantu mendorong pembaharuan pemikiran dalam konteks modern, memperkuat identitas Islam dalam politik, dan memberikan sumbangan berharga dalam upaya menciptakan tatanan politik yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip Islam.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Manusia yang beretika adalah makhluk yang bermoral. Manusia yang bermoral adalah manusia/makhluk yang baik, manusia yang baik adalah manusia harapan yang pada dirinya ditemukan potensi kemanusiaan yang memberi manfaat dengan sesama

manusianya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks. Dengan itu, peneliti mencari/menggali sumber informasi melalui jurnal, buku-buku, artikel dengan memandang, membaca, mendokumentasikan, mengumpulkan, menganalisa, dan merumuskan kalimat-kalimat yang ada.

Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu dimasa yang lampau, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi (sociological research). Pendekatan tersebut mengingat salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikirannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Epistemologi etika menurut Ibn khaldun

banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah "etika" pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, ini mengubah lagi penjelasannya tentang kata "etika". Sejak edisi ke-2 (1991) KBBI memberikan dua entri yang berbeda: "etik" (dalam edisi 1988 belum ada) dan "etile". "Etik" meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari "etika" dalam edisi 1988, sedangkan "etika" dikhususkan untuk ilmunya.

Tentu, pada masyarakat di belahan dunia manapun, terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Norma tersebut biasa disebut etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat.

Sementara itu Sidi Gazalba dalam karya klasiknya, *Sistematika Filsafat*, menyuguhkan beberapa pengertian etika dari para ahli:

1. *Ensiklopedia Wiker Prins*: Etika adalah bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan; hujah-hujahnya dan tujuan yang diarah; diarahkn kepada makna tindakan.
2. *New American Encyclopedia*: Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tapi tentang nilai-nilai; tidak mengenai sifat tindakan manusia, tapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tapi yang normatif.
3. *A.S. Hornby Dictionart*: Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan.
4. *A Handbook of Christiab Ethic*: Etika adalah ilmu normatif, memandang manusia sebagai tenaga moral, mempertimbangkan tindakan kebiasaannya dan karakter dengan tinjauan tentang benar atau salahnya, kecenderungannya kepada yang baik dan buruk.

Ibnu Khaldun sebagai pemikir Islam yang pemikirannya tetap digunakan sebagai rujukan mengenai konsep politik baik pada zamannya maupun pada zaman-zaman

sesudahnya. Pemikiran Ibnu Khaldun bercorak lebih detail baik dari pemikiran mengenai urusan duniawi terlihat dari pembahasannya yang terperinci mengenai bentuk Negara, serta sampai menekankan bahwa kedudukan pemimpin adalah wakil Allah dimuka bumi. Sebagai pemikir yang berbasic Islam, terperincinya pemikiran Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi yang terkait dengan etika politik tersebut tetap diikuti dengan terperincinya pemikiran yang membahas tentang urusan akhirat. Pernyataan Ibnu Khaldun yang menunjukkan pemikiran rinci mengenai dunia dan akhirat adalah pernyataan yang menekankan mengenai seimbangnyanya urusan dunia dan akhirat.

Menurut Ibnu Khaldun, etika politik Islam didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama yang mencakup aspek moral dan spiritual. Pemikirannya mengenai seimbangnyanya urusan dunia dan akhirat juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam tindakan politik. Dalam epistemologinya, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pengamatan empiris dan analisis rasional untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas politik. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai agama serta tujuan akhir manusia yang adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Kontribusi pemikiran Ibn khaldun terhadap perkembangan politik Islam kontemporer

Ibnu Khaldun mengemukakan pemikiran politik secara garis besar terbagi atas negara (baik dari segi pendiriannya maupun bentuk pemerintahannya), serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala negara. Hal yang paling penting daripemikiran beliau tentang politik bukan terletak dari bentuk negara, melainkan bagaimana negara dapat berjalan adil dan jujur dalam moral-etika agama yang dapat menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik danbermoral. Apapun bentuknya tidak terlepas dari konsep negara yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan tuntutan agama Islam dalam setiap hukum yang diterapkan.

Ibn Khaldun dalam melihat sistem pemerintahan terkhusus mekanisme pemimpin haruslah sehat artinya pemimpin haruslah sempurna artinya sehat badannya jelas pendengaran, penglihatan, cara jalan masih kuat dan beberapa ketentuan ketentuan lainnya.

Melihat pemikiran Ibnu Khaldun tentu tidak bisa dilepaskandari pendekatan yang dilakukan Ibn Khaldun sendiri. Dari sekian pemikiran tersebut, yang perlu untuk memberikan komentar sekaligus catatan kritis adalah terdapat dua persoalan yang mungkin jika dikontekskan dan diimplementasikan pada zaman sekarang justru menimbulkan kontroversi dan pertentangan, atau bahkan sampai berpotensi menimbulkan konflik dan keretakan terhadap persatuan negara modern, khususnya di Indonesia yang berbasis multikultural dan multireligius, terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama, yang masing masing mempunyai ruang privasi yang sangat sensitif untuk disinggung dan disentuh. Ibn khaldun melahirkan konsep konsep pemerintahan kepemimpinan.

Pertama, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang itu bisa dikategorikan telah mengabaikan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa konteks yang dihadapi Ibnu Khaldun berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat itu memang harus cakap secara fisik. Sementara kecakapan secara fisik tersebut akan sangat berpengaruh dan mendukung terciptanya stabilitas negara.

Pemimpin yang cacat fisik sangat rentan terjadi pergolakan karena tidak mempunyai

kewibawaan untuk memimpin banyak orang. Terlebih konteks saat itu, keberlangsungan sebuah Negara selalu terancam dan dikondisikan dalam suasana perang untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga mau ataupun tidak mau seorang pemimpin Negara harus cakap secara fisik dan cakap dalam memimpin peperangan. Oleh sebab itu, kecakapan mutlak dibutuhkan.

Kedua, kriteria pemimpin harus dari keturunan Quraisy. Pengamatan Ibnu Khaldun melihat bahwa kaum Quraisy mempunyai kelebihan yang hampir tidak dimiliki kaum lain. Dalam sejarah terlihat betapa pesatnya perluasan daerah kekuasaan umat Islam hingga membentuk peradaban baru, dan memberikan pengaruh bagi perkembangan peradaban lainnya.

Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di garda terdepan dalam membangun dan mempertahankan negara. Mereka merupakan simbol kekuatan dan terbentuknya 'ashabiyah bagi bangsa Arab, sehingga peranannya sangat sentral dalam memperkokoh kekuatan negara.

Bahkan dalam tuturnya Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menyebutkan syarat kesehatan yang mestinya dimiliki oleh sang pemimpin berdasar pada Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah 247 yang terjemahannya:

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut kita menarik kesimpulan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan kekayaan. Hasil analisis ini menekankan pentingnya pemimpin memiliki kualitas elektual dan kemampuan finansial yang memadai. Keilmuan memberikan aspek penting dalam kepemimpinan karena pemimpin yang berilmu dapat membuat keputusan yang bijaksana dan strategis. Mereka mampu mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka, untuk menghadapi tantangan dan memajukan organisasi atau negara yang dipimpinnya. Selain itu, kekayaan juga merupakan faktor penting dalam kepemimpinan. Pemimpin kaya memiliki sumber daya finansial untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, menyediakan infrastruktur, membantu rakyat dalam situasi sulit, serta memberikan kontribusi ekonomi bagi negara atau wilayahnya.

Dengan pengetahuan dan kekayaan tersebut, seorang pemimpin dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif. Mereka dapat memberikan solusi inovatif bagi masalah-masalah kompleks, katkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta meningkatkan daya saing negaranya di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Etika politik Islam didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama yang mencakup aspek moral dan spiritual. Pemikirannya mengenai seimbangannya urusan dunia dan akhirat juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam tindakan politik. Dalam epistemologinya, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pengamatan empiris dan analisis rasional untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas politik. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai agama serta tujuan akhir manusia yang adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pemikiran politik secara garis besar terbagi atas negara (baik dari segi pendiriannya

maupun bentuk pemerintahannya), serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala negara. Hal yang paling penting dari pemikiran beliau tentang politik bukan terletak dari bentuk negara, melainkan bagaimana negara dapat berjalan adil dan jujur dalam moral-etika agama yang dapat menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Apapun bentuknya tidak terlepas dari konsep negara yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan tuntutan agama Islam dalam setiap hukum yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinand, Gregorius Ricky, Efendi Madallo, Reinaldi Palamba, Rigel Josua, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, and others, 'Ferdinand, Gregorius Ricky Madallo, Efendi Palamba, Reinaldi Josua, Rigel Manajemen, Jurusan Ekonomi, Fakultas Jaya, Universitas Atma', 2017, 3
- Ghaffar, Ahmed Abdel, 'Misba Hoiriah Hasibuan ANALISIS PEMIKIRAN ETIKA.POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (Studi Tokoh) SKRIPSI h.1', Misba Hoiriah Hasibuan ANALISIS PEMIKIRAN.ETIKA.POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (Studi Tokoh) SKRIPSI, 20 (2016), 1
- Ilham, 'Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun', Jurnal Politik Profetik, 4.1 (2016), 1–13
- Kurniati, Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7.2 (2018), 257 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>>
- Maesaroh, siti, 'Nilai-Nilai Pendidikan Jasmani (Kajian Tafsir Al-Baqarah Ayat 247) Universitas Islam Negeri (Uin)', FITK UIN Jakarta, 2017, 1–57 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36099%0ATitle:%09>>
- Malik, Adam, Abdur Rahim, and Taufiqurachman Taufiqurachman, 'Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun Dalam Implementasinya Di Indonesia', JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6.5 (2023), 3599–3610 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>>
- Margono, Slamet, 'S. Margon. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Abadi Mahasatya,2000), Cet. Ke-2.Hlm.6', 2005
- NAUFAL, A F T, 'A Fikri Thia Naufal Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Lampung (2020) h.34', 2020 <<http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI%20BAB%201%5C&2.pdf>>
- Nazir, Moh, 'Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Galia Indonesia,1998),Hlm. 62.', Jakarta: Rhineka Cipta, 2015
- Penyusun, Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. by Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, and H.237. Balai Pustaka, Cet. I, 2016) (Balai Pustaka, 1999)
- Qamar, Nurul, Etika Dan Moral Profesi Hukum:(Ethos and Mores Profession of Law) (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Wardani, Novita ika, lumastari ajeng Wijayanti, urhuhe dena Siburian, Arditya Prayogi, afrah diba Faisal, Hikmah, and others, Ilmu Sosial Budaya Dasar Untuk Kebidanan, CV. Budi Utama, 2023